

RINGKASAN

**ROSLI SIREGAR
210510102**

**Analisis Yuridis Penangkapan Tidak Sah Yang
Dilakukan Dengan Paksaan (Putusan
Nomor.10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)
(Romi Asmara S.H., M.Hum. dan Eko Gani Pg,
S.H., M.H)**

Menurut Pasal 1 angka 20 KUHP penangkapan adalah tindakan pengekangan sementara waktu untuk mengumpulkan informasi dan bukti dalam penyidikan atau penuntutan berdasarkan bukti yang cukup sesuai Undang-Undang. Terjadinya penangkapan tidak sah disebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat penangkapan yang sah sesuai hukum, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, dan terjadinya pelanggaran prosedur penangkapan. Fokus permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hukum terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan dan sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku penangkapan tidak sah dengan paksaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji melalui Undang-Undang dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang menjadi acuan perilaku setiap manusia. Penelitian ini menganalisis putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber data sekunder yang sifatnya kepustakaan lebih lanjut dan disajikan oleh penulis yang berupa dokumen, buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

Hasil penelitian: Pertimbangan hakim terhadap penangkapan tidak sah yang dilakukan dengan paksaan telah memberikan pertimbangan yang menghasilkan keadilan, hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis yaitu dalam hal penetapan tersangka, aparat penegak hukum telah melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang. Pertimbangan filosofis hakim membenarkan penangkapan terhadap Pegi dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Pertimbangan sosiologis, hakim melihat dampak yang diterima oleh Pegi atas penangkapan terhadap dirinya. Dari pertimbangan tersebut hakim menyatakan Pegi Setiawan bebas dari tuntutan pidana. Untuk sanksi yang dapat diberikan tidak ada sanksi yang diberikan terhadap pelaku hanya rehabilitasi saja sedangkan korban telah mengalami kerugian atas penangkapan tersebut dan perlindungan HAM nya diabaikan.

Saran: kepolisian khususnya penyidik dalam menjalankan tugasnya haruslah mengedepankan asas praduga tak bersalah, pertanggungjawaban penyidik haruslah dikenakan kepada penyidik berupa pertanggungjawaban pidana, perdata, dan pertanggungjawaban disiplin kode etik.

Kata kunci: Penangkapan, Paksaan, HAM, Kepolisian, Sanksi

SUMMARY

**ROSLI SIREGAR
210510102**

***Legal Analysis of Unlawful Arrest Conducted with
Coercion (Decision Number
10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg)
(Romi Asmara S.H., M.Hum. dan Eko Gani Pg,
S.H., M.H)***

According to Article 1 number 20 of the Criminal Procedure Code (KUHP), arrest is a temporary restraint action to collect information and evidence in investigation or prosecution based on sufficient evidence in accordance with the law. The occurrence of unlawful arrest is caused by the non-fulfillment of lawful arrest requirements according to law, abuse of power by law enforcement officials, and violations of arrest procedures. The focus of the problem addressed in this research is how legal considerations apply to unlawful arrests carried out with coercion after final judgment (*inkrah*) and what sanctions can be given to perpetrators of unlawful arrest with coercion.

This research uses normative juridical research methods, namely legal research that examines through laws and legal principles conceptualized as norms or rules that apply in society and serve as behavioral references for every human being. This research analyzes decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN/Bdg. The legal sources used are secondary data sources that are bibliographic in nature and presented by the author in the form of documents, books, or journals related to the main issues being studied.

The research findings indicate that the judge's considerations regarding unlawful arrests made with coercion after a final decision have led to a ruling that promotes justice. The judge has taken into account the legal aspects, noting that law enforcement officials conducted the arrest arbitrarily during the suspect's designation. The philosophical considerations of the judge justify that the arrest of Pegi was deemed inconsistent with procedural norms. From a sociological perspective, the judge recognized the impact that the arrest had on Pegi personally. Based on these considerations, the judge declared Pegi Setiawan free from criminal charges. As for sanctions, no penalties were imposed on the perpetrator; only rehabilitation was suggested, while the victim suffered losses due to the arrest, and their human rights were neglected.

The author's recommendation: the police, particularly investigators, must prioritize the presumption of innocence in carrying out their duties. Investigators should be held accountable through criminal, civil, and disciplinary responsibilities in accordance with the code of ethics.

Keywords: Arrest, Coercion, Human Rights, Police, Sanctions